



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

## RENJA 2024



Jl. Pahlawan No. 01  
Gedung Mal Pelayanan Publik 75242  
[www.dpmtsp.samarindakota.go.id](http://www.dpmtsp.samarindakota.go.id)

*Selamat Datang*  
MAL PELAYANAN PUBLIK

Samarinda, 20 Juli 2023



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
<b>BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	32
3.3 Program dan Kegiatan.....	35
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	39
<b>BAB V : PENUTUP</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, perangkat daerah sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda untuk menghadapi persoalan pada tahun kedepan. Rencana Kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berupaya untuk mengintegrasikan segenap kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sehingga mampu menjawab tantangan kedepan.

Rencana Kerja merupakan turunan dari rencana panjang jangka menengah yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kondisi potensi, kondisi peluang, kondisi kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul dan mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan yang nyata dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DPMPTSP, evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026.



Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja DPMPSTP Kota Samarinda mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Samarinda, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan bagi OPD untuk memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) pada tahun 2024;
3. Renja merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda disusun atas dasar Landasan dan Peraturan sebagai berikut:

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur DPMPSTP;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
31. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja DPMPSTSP Kota Samarinda Tahun 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DPMPSTSP Kota Samarinda Tahun 2024.

Sedangkan Tujuan disusunnya Rencana Kerja DPMPSTSP Kota Samarinda Tahun 2024 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renja DPMPSTSP Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut:





---

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN,</b>
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>
	2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3 Program dan Kegiatan
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>





## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Perencanaan Kinerja DPMPSTSP Kota Samarinda Tahun 2022 telah disusun berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan prioritas-prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pada tahun 2022 DPMPSTSP Kota Samarinda menerima anggaran APBD-P sebesar Rp.23.350.760.182,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 6 (Enam) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan. Penyerapan Anggaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp.19.609.958.029,- atau 83,98 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

DPMPSTSP Kota Samarinda menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPMPSTSP Kota Samarinda. Dari Realisasi fisik yang dicapai sebesar 1000% maka hasil pengukuran kinerja DPMPSTSP Kota Samarinda Tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Sasaran strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Relisasi</b>
1.	Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi	Nilai Investasi	Rp. 1.000.000.000.000,-	Rp. 1.737.419.619.798,-
2.	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	90	89,69

Berikut rincian Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2022:



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

**Tabel T-C.29.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Kota Samarinda**  
**3**

**Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>									
2 18 1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	IKM	94	88,7 %	90	89.69	99,6 %	87.5	87	99.4%
2 18 1 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP	85	90 %	80	79,55	97,9 %	80	80	92,15%
2 18 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42 Dokumen	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
2 18 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja	6 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2 18 1 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	7 Laporan	100 %	7 Laporan	7 Laporan	100 %	7 Laporan	7 Laporan	100 %
2 18 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan	73 Orang	100 %	73 Orang	73 Orang	100 %	73 Orang	73 Orang	100 %
2 18 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang di bayarkan	48 Orang	100 %	48 Orang	48 Orang	100 %	48 Orang	48 Orang	100 %
2 18 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	2 Laporan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %
2 18 1 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	3 Laporan	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 18 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2 18 1 2.05	<b>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pegawai	121 orang	100 %	121 orang	121 orang	100 %	121 orang	121 orang	100 %
2 18 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	72 Paket	0 %	72 Paket	0 Paket	0 %	72 Paket	72 Paket	100 %
2 18 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	100 %	30 orang	0 orang	0%	30 orang	15 orang	50 %
2 18 1 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	5 Laporan	100 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %
2 18 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %
2 18 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %
2 18 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	0 %	0 Paket	0 Paket	0 %	10 Paket	5 Paket	50 %
2 18 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis kantor	5 Jenis	100 %	5 Jenis	5 Jenis	100 %	5 Jenis	5 Jenis	100 %
2 18 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
2 18 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	40 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 18 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80 Laporan	25 %	20 Laporan	20 Laporan	100 %	20 Laporan	20 Laporan	100 %
2 18 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	10 SPPD	100 %	10 SPPD	10 SPPD	100 %	10 SPPD	10 SPPD	100 %
2 18 1 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	6 Laporan	15 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	30 %
2 18 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	30 %	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	35 %
2 18 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	30 %	2	2	100 %	2	2	50 %
2 18 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30 %	1	1	100 %	1	1	60 %
2 18 1 2.07 1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30 %	1	1	100 %	1	1	60 %
2 18 1 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %
2 18 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening Yang Dibayarkan	48 Bukti Pembayaran	100 %	48 Bukti Pembayaran	48 Bukti Pembayaran	100 %	48 Bukti Pembayaran	48 Bukti Pembayaran	100 %
2 18 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan Jasa Peralatan & Perlengkapan kantor	18 Laporan	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %
2 18 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18 Laporan	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %
2 18 1 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Laporan Pemeliharaan	3 Laporan	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %
2 18 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	8 Unit	100 %	8 Unit	8 Unit	100 %	8 Unit	8 Unit	100 %



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	7 Unit	100 %	7 Unit	7 Unit	100 %	7 Unit	7 Unit	100 %
2 18 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60 Unit	100 %	60 Unit	60 Unit	100 %	60 Unit	60 Unit	100 %
2 18 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %
2 18 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %
2 18 2	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Nilai Realisasi Investasi (Rp)	6.000.000.000.000	1.766.235.000.000	1.000.000.000.000	1.737.419.619.798	173,74 %	2.100.000.000.000	630.234.380.000	30 %
2 18 2 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda	1 PERDA	0 %	1 PERDA	-	0 %	1 PERDA	-	0 %
2 18 2 2.01 1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	15 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %	100 %
2 18 2 2.01 2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yg Memperoleh Insentif & Kemudahan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %
2 18 2 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	2 Dokumen	20 %	2 Dokumen	-	0 %	2 Dokumen	1 Dokumen	50 %
2 18 2 2.02 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	1 Dokumen	0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0	-	-	0 %	2 Dokumen	2 Dokumen	35 %
2	18	3			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	31	1	2	2	100 %	5	8	25 %
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event	25 Event	4	3 Event	3 Event	90 %	3 Event	3 Event	52 %
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	25 Dokumen	4	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	52 %
2	18	4			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Izin Terbit yang Efektif	15750	1078	2550	17595	100 %	2600	6088	45%
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Terbit	21750	3840	3550	19888	100 %	3600	10.742	55%
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha	26500	4918	5100	15244	100 %	5200	13.983	55%
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha	200	0	-	-	0 %	200	200	100 %



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 4 2.01 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat	40	40	40	40	100 %	40	40	100 %
2 18 5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang Masuk	1500	-	300	300	100 %	200	400	-
2 18 5 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian	1000	20 %	200 Laporan	200 Laporan	100 %	200	200	40 %
2 18 5 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yg Melakukan Koordinasi & Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	230	30	50	50	100 %	50	180	50 %
2 18 5 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yg Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	250	30	50	50	100 %	50	180	50 %
2 18 5 2.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan di Kota Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	500	30	100	100	100 %	100	230	50 %
2 18 6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pengguna Layanan Data	24500	1988	3000	1988	96,7 %	4100	5000	40 %





*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2		3		4		5			
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem Aplikasi	14	9	1	1	100 %	1	11	78,5 %
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	24000	5512	5000	5512	100 %	5000	15232	51,7 %



Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 2022, Adapun realisasi Fisik yang dicapai adalah sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 83,98 %. Belum optimalnya pencapaian realisasi fisik dan penyerapan realisasi keuangan dikarenakan masih adanya kendala terhadap dampak pasca pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh pada iklim investasi di Kota Samarinda serta kegiatan dunia usaha yang belum pulih.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada DPMPTSP Kota Samarinda sebagai pendukung pelaksanaan Program-program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi salah satu Fokus untuk peningkatan kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana pada akhir tahun 2021, DPMPTSP Kota Samarinda menempati Gedung Baru di Jalan Pahlawan No. 1 Samarinda, dimana masih membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana untuk Pelayanan Publik dan penyelenggaraan MPP (Mal Pelayanan Publik) untuk dapat memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat Kota Samarinda.

Capaian Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Tahun 2022 yaitu adanya Dokumen Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dimana sudah tersusunnya Naskah Akademis Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, serta Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Walikota Samarinda No 20 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Samarinda Tahun 2017-2025.

Capaian Program Promosi Penanaman Modal, pada Tahun 2021 pelaksanaan Promosi Investasi melalui event Pameran sebanyak 2 event dari 2 event yang ditargetkan, dan melalui event seminar temu usaha sebanyak 1 event.

Capaian Program Pelayanan Penanaman Modal, terkait pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu, dimana target pada tahun 2022 sebanyak 5100 Pelaku Usaha terlayani sebanyak 15.224 pelaku Usaha, dan target jumlah izin terbit 3550 izin telah tercapai sebanyak 19.888 izin terbit.

Capaian Program Pengendalian Pelaksanaan Modal, sebanyak 300 LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang masuk dimana telah dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 45 Kegiatan usaha yang dipantau, 300 Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal, dan 353 Kegiatan usaha yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal.

Capaian Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dimana pada tahun 2022 DPMPTSP Kota Samarinda meluncurkan Aplikasi SIPO (Sistem Informasi Perizinan Online) berbasis android untuk memudahkan masyarakat



mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan secara online, disamping itu mengintegrasikan aplikasi KWSPD BAPENDA, untuk sistem pengawasan otomatis retribusi Pajak Daerah bagi calon pemohon izin. Serta Peluncuran Aplikasi Si Pelataran (Sistem Pelayanan Tanpa Antrian). Dari target jumlah data dan informasi perizinan yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan sebanyak 4000 data, telah tercapai 20.794 Data.

Pada tahun 2023, DPMPTSP Kota Samarinda menerima anggaran sebesar Rp.24.530.188.156,- yang dialokasikan pada 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Realisasi anggaran sampai bulan Juni 2023 sebesar Rp.9.259.281.164,- atau sebesar 37,75%, sedangkan realisasi fisik sebesar 51.06%.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama, Standar Pelayanan Minimal daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan OPD dalam melaksanakan pembangunan setiap tahunnya dijadikan tolak ukur kinerja OPD. Secara ringkas dan terperinci, Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Samarinda dapat terlihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel T.C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP  
Kota Samarinda**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(17)
1	Jumlah Nilai Investasi	-	-	1.000.000. 000.000	2.100.000. 000.000	3.000.000. .000.000	3.600.000 .000.000	1.737.419 .619.798	630.909,0 40.000	3.000.00 0.000.00 0	3.600.00 0.000.00 0	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	90	91	91,5	92	89,7	90	91,5	92	

### Indikator Jumlah nilai Investasi

Pencapaian indikator kinerja Jumlah Nilai Investasi di ukur dari nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN yang berinvestasi di Kota Samarinda berdasarkan data Izin Prinsip Penanaman Modal.

Capaian Indikator kinerja jumlah nilai investasi tahun 2022 sebesar Rp. 1.737.419.619.798,-, secara keseluruhan dari 2 indikator kinerja ini capaian telah **BAIK**. Pencapaian indikator ini melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp.64.990.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.59.245.550,-. Persentase realisasi 91,16%. Penanaman modal dibagi dua yaitu,



Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja ini adalah :

1. Membuat Peraturan daerah Kota Samarinda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal untuk memberikan kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi bagi peningkatan penanaman modal dan berinvestasi di kota samarinda
2. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah terkait dengan upaya Harmonisasi Investasi Kajian Calon Inestor pada DPMPTSP Kota Samarinda.
3. Pelaksanaan monitoring evaluasi peta potensi penanaman modal investasi kota samarinda.
4. Melakukan kegiatan Konsultasi/Pendampingan kepada Investor untuk melaporkan kegiatan investasi.
5. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Bimbingan teknis perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
6. Penyusunan dokumen-dokumen investasi seperti peta potensi, profil investasi dan potensi unggulan daerah kota Samarinda.

Program kegiatan lain yang mendukung upaya untuk meingkatkan capaian indikator kinerja peningkatan nilai investasi sebagaimana terurai dalam beberapa kegiatan berikut ini :

1. **Kegiatan Promosi Penanaman Modal dalam dan luar kota wilayah kalimantan timur.** Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan kota samarinda sebagai kota tujuan investasi agar nilai investasi di kota samarinda terus meningkat.

Analisis pencapaian target dengan terlaksananya kegiatan promosi pameran yang terus dilaksanakan dalam upaya mempromosikan dan memperkenalkan produk unggulan daerah samarinda. Pelaksanaan kegiatan pameran yang dapat dilaksanakan kegiatan pameran dalam wilayah Kalimantan Timur dan kegiatan pameran luar wilayah Kalimantan Timur. dalam rangka menampilkan informasi hasil-hasil pembangunan fisik dan non fisik, mempromosikan dan memperkenalkan produk unggulan daerah dan produk kreatif serta menyebarluaskan informasi potensi daerah dalam hal investasi, pariwisata dan perdagangan.

2. **Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.** Jumlah Penerbitan Izin dalam rangka Peningkatan Investasi Daerah Kota Samarinda yang masih masuk dalam izin pendelegasian PTSP telah dilaksanakan dengan baik. DPMPTSP terus mengembangkan inovasi Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO) yang merupakan Layanan Pendaftaran



Izin Secara Online Dan Tracking Izin Untuk Melihat Proses Izin yang dapat diakses langsung oleh pemohon melalui website DMPTSP. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan layanan dan memudahkan pemohon yang akan mengurus perizinan usahanya. Rincian permohonan izin terbit yang dapat diproses oleh DPMTSP pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Jumlah Permohonan Izin yang terlayani melalui Aplikasi SIPO Tahun 2022**

No.	NAMA IZIN	Jumlah Izin Terbit
1.	Penerbitan SIPP	756
2.	SIPA Pelayanan	193
3.	SIPA Cabut	103
4.	SIPA Ahli Labolatorium	163
5.	SIPA Distributor	19
6.	SIPA Bidan	275
7.	SIPA Bidan Mandiri	28
8.	SIPPA (Izin Anastesi)	8
9.	SIP-E (Izin Praktik Elegtromagnetis)	5
10.	SIPF (Fisioterapi)	20
11.	SIPF Mandiri(Fisioterapi Mandiri)	5
12.	SIPTTK (Izin Kefarmasian)	251
13.	SIPOT (Izin Okupasi Terapis)	4
14.	SIPRad (Izin Radiografer)	37
15.	SIK PM (Izin Perekam Medis)	30
16.	SIPRO (Izin Praktek Refleksionis dan Optimetris)	14
17.	SIP-Gz (Izin Tenaga Gizi)	28
18.	SIPTGM (Izin Terapis Gizi dan Mulut)	18
19.	SIPTW (Izin Terapis Wicara)	6
20.	SIPPK (Izin Psikologi Klinis)	6
21.	SIKTS (Izin Tenaga Sanitarian)	25
22.	Penyehat Tradisional	9
23.	Izin Apotik	30
24.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	1
25.	Izin Operasional Alat Kesehatan	3
26.	Izin Operasional Klinik	15
27.	Izin Operasional Rumah Sakit	
28.	Izin Pelayanan Hemodialisis	1
29.	Izin Penyelenggaraan Lab.Pratama	
30.	Izin Toko Obat	4
31.	Izin Optik	1
32.	Pest Control	1
33.	SLS DAM (Sertifikat Kaik Sehat Depot Air Minum)	9
34.	SLS IRT	76
35.	SLS PIRT/SPPIRT	73
36.	SLS Resto	13
37.	Laik Sehat Hotel	4
38.	Mikol	4
39.	Reklame Tetap	19
40.	Sosial	5



41.	Pengumpul Uang	3
42.	Pendidikan (PAUD)	9
43.	Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	15
<b>TOTAL</b>		<b>2.289</b>

3. **Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.** Iklim penanaman modal yang kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha untuk melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal secara berkala terus di upayakan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan laporan realisasi investasi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Kegiatan pemantauan di fokuskan untuk pengumpulan, evaluasi dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal.
- Kegiatan pembinaan dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis LKPM Online, sosialisasi dan bimbingan teknis OSS RBA, sosialisasi kemitraan Usaha
- Kegiatan pengawasan dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal melalui pelaksanaan sosialisasi kebijakan berusaha.

4. **Kegiatan Pengolahan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.** Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Dimana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis. Analisis pencapaian target kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal telah tercapai dengan melaksanakan Kegiatan-kegiatan antara lain :

- Secara rutin melakukan dilakukan pemeliharaan IT memastikan bahwa semuanya terus berjalan dengan lancar dan efisien untuk mempertahankan sistem dan menjaga sistem, peralatan yang digunakan, aplikasi, jaringan, database, dll. Dalam kondisi baik.
- Peluncuran Aplikasi “Si Pelataran” (Sistem Pelayanan Tanpa Antrian), Pengembangan aplikasi melalui integrasi Aplikasi Sistem Informasi dan Perizinan Online (SIPO) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dengan Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD). Dengan adanya integrasi, di harapkan pemohon perizinan



akan di periksa ketertiban pajak terlebih dahulu, jika terdapat tunggakan atau permasalahan maka proses pendaftaran di DPMPSTP tidak di lanjutkan, Pemohon di harapkan menyelesaikan terlebih dahulu di Bapenda.

- Melaksanakan pengarsipan digital.
- Data dan informasi perizinan yang tersaji cepat dan akurat selalu di update melalui website ([dpmptsp.samarindakota.go.id](http://dpmptsp.samarindakota.go.id)) dan Media Sosial seperti Facebook (FB: DpmptspSamarinda) dan Instagram (Dpmptsp Kota Samarinda) agar masyarakat mudah untuk mengakses data dan informasi tentang pelayanan perizinan dan informasi lainnya.

### **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Pencapaian indikator kinerja ini di ukur dari Survey Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan di DPMPSTP yang dilakukan setiap tahunnya. Analisis dan evaluasi terhadap keberhasilan atas pencapaian target ini dilakukan dengan melakukan Penyusunan Laporan SKM dan melakukan perbaikan kinerja pelayanan terutama pada unsur pelayanan dengan nilai terendah.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diterima untuk Seluruh layanan Penanaman Modal, Perizinan dan non Perizinan, maupun layanan berbantuan OSS yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dan telah dicapai 231 responden maka dapat dilakukan perhitungan. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata yang diperoleh dari setiap jenis pelayanan yang telah mencapai 231 responden maka diperoleh hasil skor rata-rata Indeks **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM): 89,69**. Dengan mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31 - 100.

Berdasarkan hasil Indeks SKM yang telah dilakukan maka dipandang perlu untuk mengadakan beberapa upaya perbaikan kinerja pelayanan Perizinan dan non Perizinan, Penanaman Modal, dan layanan berbantuan OSS khususnya kepada Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, dan Waktu Pelayanan karena pada awal hingga akhir tahun 2022 ini masih terhambat oleh situasi pandemi virus COVID-19 yang membatasi pelayanan tatap muka, dan menggunakan Sistem Online yang membuat





masyarakat atau pengguna layanan kebingungan dengan Persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur serta waktu penyelesaian yang disesuaikan dengan situasi yang mendukung protokol kesehatan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan prima dalam rangka mewujudkan DPMPSTSP Kota Samarinda sebagai wilayah “birokrat yang bersih dan melayani”.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya.

Secara garis besar, kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sudah baik, namun masih dipandang perlu untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan karena harus mampu menyesuaikan perubahan-perubahan regulasi peraturan perundangan yang berlaku serta perkembangan zaman yang semakin maju dan modern.

Adapun permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat Daerah DPMPSTSP Kota Samarinda adalah:

1. Masih kurangnya perhatian dan tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang menjadi dasar dalam penghitungan realisasi investasi.
2. Situasi dan kondisi pasca pandemi Covid 19 berdampak signifikan bagi beberapa perusahaan yang berinvestasi di Kota Samarinda sehingga perusahaan tersebut menghentikan sementara proses kegiatan berusaha di mana pada akhirnya realisasi investasi tidak terealisasi secara fisik dan banyak LKPM pelaku usaha yang tercatat nihil.
3. Masih banyaknya LKPM yang disampaikan pelaku usaha tidak disampaikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
4. Kurang tegasnya sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM nya secara berkala.
5. Masih perlunya peningkatan Sarana & Prasarana Pelayanan Publik khususnya sarana prasarana penunjang Mal Pelayanan Publik.
6. Sistem Informasi Teknologi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan masih perlu ditingkatkan/dikembangkan yang up to date agar pelayanan perizinan lebih inovatif.



7. Masih rendahnya penguasaan dan pemahaman tentang Regulasi Peraturan perundangan tentang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan serta pemanfaatan Sistem OSS (Online Single Submission).

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi DPMPPTSP Kota Samarinda dalam pencapaian visi misi, tujuan dan sasaran serta capaian program terkait Peningkatan Realisasi Investasi dan Kepuasan Masyarakat, perlu diantisipasi dan dirumuskan pemecahan masalah dengan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terutama dalam mewujudkan kota Samarinda sebagai “Smart City” dengan mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan, serta mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.

Tantangan yang dihadapi DPMPPTSP Kota Samarinda dalam upaya peningkatan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Revitalisasi dan Tataruang Investasi/Penanaman Modal Belum terwujud
2. Pencapaian program Peningkatan Iklim investasi, Pemasaran produk unggulan, pengembangan pajak dan perizinan, dan pengembangan budidaya dan produk komoditi/potensi investasi kurang terakses
3. Penyiapan dan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Investasi sangat lamban
4. Iklim dan Akses Pengembangan Kerjasama Investasi/Penanaman Modal secara umum kurang di dukung
5. Kualitas Aparatur pelayanan perizinan yang perlu ditingkatkan, mengingat Peraturan mengenai perizinan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman
6. Sarana dan Prasarana yang perlu ditingkatkan demi peningkatan kualitas pelayanan

Sedangkan Peluang DPMPPTSP Kota Samarinda untuk dapat meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Kawasan-kawasan investasi dan lingkup organisasi bisnis di berbagai wilayah pada umum semakin bertambah dan mudah diakses;
2. Jaringan Kerjasama investasi dalam negeri semakin terbuka bagi PMA maupun PMDN dan pada umumnya dapat diakses;
3. Pertumbuhan Lembaga keuangan dan Bank semakin berkembang dan sangat menunjang;
4. Penerapan Jaringan komunikasi dan teknologi informasi semakin meluas dan berperan dalam dunia e-commers dan bisnis investasi;
5. Sumber Daya dan potensi alam dalam peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;



6. Komitmen Pemerintah Kota Samarinda untuk terus berupaya meningkatkan Kepuasan Masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, efektif, efisien, dan akuntabel.

7. Situasi keamanan dan ketertiban Kota Samarinda yang kondusif.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, dan peluang DPMPSTP Kota Samarinda, diformulasikan isu-isu penting sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing Kota Samarinda
2. Tersedianya rumusan kebijakan penanaman modal yang mendukung iklim investasi Kota Samarinda sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan penanaman modal yang diarahkan pada peningkatan daya saing kota.
3. Meningkatkan citra Kota Samarinda sebagai Kota tujuan penanaman modal yang prospektif dan kondusif dan menjanjikan bagi para investor baik dalam maupun luar negeri.
4. Meningkatkan kerjasama penanaman modal pemerintah dengan UMKM sebagai percepatan investasi di Kota Samarinda.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan pelayanan yang berdampak pada kondusifnya iklim investasi di Kota Samarinda.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil Analisa kebutuhan serta Pemutakhiran untuk pelaksanaan Tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

**Tabel T-C.31.  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kota Samarinda**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lembar 1 dari 4

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	30.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja	3 Dokumen	30.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja	3 Dokumen	50.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan	71 Orang	10.596.014	Penyediaan alat tulis kantor	Samarinda	Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan	71 Orang	13.672.632	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang di bayarkan	48 Orang	1.234.827	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang di bayarkan	3 Dokumen	1.312.229	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	50.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	7 Laporan	50.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	3 Paket	65.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	71.686	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	100.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yg Disediakan	10 Paket	150.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	60.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	180.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	26.763	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	15 Paket	250.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	430.000	



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Lembar 2 dari 4**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	10 Dokumen	39.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	39.600	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	12.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	22.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	jumlah Laporan	20 Laporan	198.972	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	198.972	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Tersedianya Kendaraan	2 Unit	575.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit	1 Unit	90.000	
	Pengadaan Mebel	Samarinda	Tersedianya Mebel	0	0	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	118.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan	36 Laporan	1.213.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan	36 Laporan	1.109.571	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan	1 Laporan	100.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan	1 Laporan	80.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan	3 Laporan	2.152.673	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan	3 Laporan	1.605.080	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan	8 Unit	301.130	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	258.480	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	307.150	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	156.707	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	217.390	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	217.390	



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Lembar 3 dari 4**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2.230.519	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	586.710	
<b>2.</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>					<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>					
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah	1 Dokumen	300.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah	0 Dokumen	0	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	283.000	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Samarinda	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	20 Dokumen	300.234	
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</b>					<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>					
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah (Perda)	1 Dokumen	252.350	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	259.920	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	Samarinda	Jumlah Peta Potensi Investasi	1 Dokumen	576.800	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	594.104	
<b>3.</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>					<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>					
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi	1 Dokumen	210.347	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	730.980	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	4 Event	709.690	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	216.657	
<b>4</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>					<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>					
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha	5200 Pelaku Usaha	324.348	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5300 Pelaku Usaha	334.078	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha	220 Kegiatan Usaha	257.500	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	240 Kegiatan Usaha	265.225	



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

**Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Lembar 4 dari 4**

No	Rancangan Awal RKPД				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Samarinda	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi	40 Orang	278.100	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Samarinda	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	286.443	
<b>4.</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>				<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>						
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	159.650	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Samarinda	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	50 Kegiatan Usaha.	164.439	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	103.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	70 Pelaku Usaha	304.490	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan di Kota Samarinda	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	103.000	Pengawasan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha	231.090	
<b>5.</b>	<b>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>				<b>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>						
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah Data dan Informasi	5000 Dokumen	396.550	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5000 Dokumen	408.446	





## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan uraian mengenai hasil kajian program / kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, yang langsung ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari Penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

Tabel T-C.32.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kota Samarinda

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL/</b> Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Regulasi Yang Mendukung Investasi	1 Regulasi	-
2.	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL /</b> Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda dan Luar Daerah	Jumlah Investor	225 Investor	-
3.	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL /</b> Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	91.5 %	-
4.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL/</b> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Yang Melapor LKPM	300 Pelaku Usaha	-
5.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL /</b> Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Pengguna Layanan Data	4200 Orang	-

Program kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat



---

kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil Usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk Menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappedalitbang. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyesuaian program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pada Musrenbang tahun 2024, DPMPSTP Kota Samarinda belum terdapat Usulan baik musrenbang di tingkat Kelurahan maupun tingkat kota.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Presiden Republik Indonesia memberikan arahan untuk pencapaian visi 2045 Menjadi Negara Pendapatan Tinggi dan Ekonomi Terbesar Dunia melalui transformasi ekonomi yang harus didukung oleh industrialisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, dan penyederhaan regulasi dan birokrasi.

Visi Presiden tersebut terakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dengan tema Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Tujuh agenda menjadi prioritas pembangunan RPJMN IV 2020 – 2024 diantaranya adalah (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, (2) Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerintahaan, (3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dan (5) Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Agenda prioritas tersebut menitikberatkan wilayah sebagai basis pembangunan.

Terdapat beberapa indikasi isu penting di tahun 2024 yaitu pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi yang inklusif dalam jangka menengah dan panjang. Terkait dengan urusan penanaman modal, fokus dilakukan guna mendukung prioritas pembangunan ke-1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dengan highlight major project meliputi pengembangan kawasan industri, peningkatan peran UMKM dan peningkatan peran destinasi wisata yang dilakukan dengan tujuan untuk menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi.

Berdasarkan dokumen perencanaan nasional, Investasi menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional selain ekspor dikarenakan:

1. Investasi akan meningkatkan perekonomian yang sempat turun karena dampak pasca pandemi Covid – 19 baik melalui pembangunan unit usaha baru, peningkatan kapasitas produksi maupun perluasan usaha.
2. Investasi akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas yang apabila dapat dipenuhi oleh ketersediaan tenaga kerja yang ada akan menurunkan angka pengangguran pasca pandemi.



## **Telaah Renstra BKPM RI**

Sesuai dengan arahan Presiden bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

**BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta



2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatkan realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

#### **Telaah Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung Misi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur terutama pencapaian target pada misi “Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan” dan misi “Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik.

Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tujuan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 adalah **“Meningkatkan Realisasi Investasi sektor Non Migas dan Non Batu Bara”** melakukan Strategi dengan cara Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non Migas dan Non Batubara.

Sasaran DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari enam sasaran yaitu:

1. Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategi
2. Terselenggaranya Penyusunan Strategi Promosi dan Kegiatan Promosi Penanaman Modal
3. Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang lebih mudah dan cepat
4. Terwujudnya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Terinformasikannya Pengurusan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik
6. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan



DPMPPTSP dalam hal memenuhi sasaran rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 dengan cara melakukan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyediaan fasilitas/ insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara
2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik
3. Pemantauan komitmen perizinan
4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Renja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2021-2026, dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi misi. adapun visi Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah Terpilih dalam Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 adalah :

**" TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"**

Dalam mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026, Yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Adapun yang menjadi fokus DPMPPTSP Kota Samarinda adalah misi ke-2 dan misi ke-3.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal yang lebih berhasil dan lebih maju, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan. Dengan kata lain menjadikan suatu realita antara keinginan (*das solen*) dan kenyataan (*das sein*), pada kurun waktu tertentu.



Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai:

1. **Idealistik** artinya suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan sesuatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik, dan berhasil;
2. **Jangkauan** kedepan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
3. **Abstrak**, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
4. **Konsisten**, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (*Specific, Measurable, Acceptable, Result Timeliness*).

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas, Sasaran bersifat spesifik, terstruktur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan maupun bulanan.

Sasaran Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda akan difokuskan pada upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Peningkatan Investasi sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dari Kota Samarinda.

Oleh Karena itu upaya perwujudan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam tahun 2021-2026 yang akan datang diarahkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator sasaran sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
2. Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsive, efektif.

Sedangkan Sasaran dari Tujuan Jangka Menengah yaitu :

1. Meningkatkan Realisasi Investasi;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan;

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP Kota Samarinda





*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Kinerja Sasaran			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	835M (Rp)	1,73 T (Rp)	2,1 T (Rp)	3 T (Rp)	3,6 T (Rp)	4,2 T (Rp)
2.	Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsive, efektif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	88,7	89,69	91	91,5	92	92,5



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

**3.3. Program dan Kegiatan**

**Tabel T-C.33.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kota Samarinda**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lembar 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 18 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai IKM	Kota Samarinda	88				88.5	
2 18 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP	Kota Samarinda	80.5				81	
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	7 Dokumen	100.000.000	APBD Kota	-	7 Dokumen	50.000.000
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kota Samarinda	3 Laporan	50.000.000	APBD Kota	-	3 Laporan	30.000.000
2 18 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	1 Laporan	50.000.000	APBD Kota	-	1 Laporan	20.000.000
2 18 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	Kota Samarinda	3 Laporan				3 Laporan	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	71 Orang	13.672.632.737	APBD Kota	-	71 Orang	15.381.222.000
2 18 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	3 dokumen	1.312.299.475	APBD Kota	-	3 dokumen	1.599.859.000
2 18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Samarinda	7 Laporan	50.000.000	APBD Kota	-	7 Laporan	27.000.000
2 18 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	Kota Samarinda	10 Laporan				8 Laporan	
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	3 Paket	65.000.000	APBD Kota	-	2 Paket	13.000.000
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Paket	10.000.000	APBD Kota	-	15 Paket	1.500.000.000
2 18 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Paket	150.000.000	APBD Kota	-	15 Paket	500.000.000
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	15 Paket	60.000.000	APBD Kota	-	15 Paket	200.000.000
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	15 Paket	430.000.000	APBD Kota	-	15 Paket	483.000.000



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lembar 2 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Dokumen	39.600.000	APBD Kota	-	10 Dokumen	150.000.000
2 18 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	15 Laporan	22.000.000	APBD Kota	-	20 Laporan	58.000.000
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	10 Laporan	198.972.000	APBD Kota	-	10 Laporan	1.500.000.000
2 18 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Rencana Kebutuhan Barang</b>	Kota Samarinda	7 Laporan				2 Laporan	
2 18 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Unit	90.000.000	APBD Kota	-	8 Unit	800.000.000
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Unit	118.000.000	APBD Kota	-	1 Unit	60.000.000
2 18 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan Penyediaan Jasa</b>	Kota Samarinda	3 Laporan				3 Laporan	
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	36 Laporan	1.109.571.333	APBD Kota	-	36 Laporan	1.152.000.000
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Laporan	80.000.000	APBD Kota	-	2 Laporan	560.000.000
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	3 Laporan	1.605.080.000	APBD Kota	-	3 Laporan	1.805.080.000
2 18 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan Pemeliharaan</b>	Kota Samarinda	8 Laporan				4 Laporan	
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	12 Unit	258.480.300	APBD Kota	-	12 Unit	986.800.000
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	7 Unit	156.707.300	APBD Kota	-	7 Unit	716.500.000
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	5 Unit	217.390.000	APBD Kota	-	5 Unit	55.000.000
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	1 Unit	586.710.000	APBD Kota	-	1 Unit	350.000.000



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lembar 3 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 18 02	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Jumlah Regulasi Yang Mendukung Investasi</b>	Kota Samarinda	1 Regulasi				1 Regulasi	
2 18 02 2.01	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perda</b>	Kota Samarinda	1 Dokumen				1 Dokumen	
2 18 02 2.01 04	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kota Samarinda	20 Dokumen	300.234.000	APBD Kota	-	20 Dokumen	309.240.000
2 18 02 2.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah dokumen</b>	Kota Samarinda	2 Dokumen				2 Dokumen	
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	259.920.000	APBD Kota	-	1 Dokumen	309.240.000
2 18 02 2.02 04	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	1 Dokumen	594.104.000	APBD Kota	-	1 Dokumen	879.635.000
2 18 03	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Jumlah Promosi yang diselenggarakan</b>	Kota Samarinda	225 Investor				230 Investor	
2 18 03 2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Promosi yang diselenggarakan</b>	Kota Samarinda	3 Event				4 Event	
2 18 03 2.01 02	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Samarinda & Luar Daerah	3 Dokumen	730.980.000	APBD Kota	-	4 Dokumen	752.909.000
2 18 03 2.01 02	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kota Samarinda	1 Dokumen	216.657.000	APBD Kota	-	1 Dokumen	218.000.000
2 18 04	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	Kota Samarinda	91.5 %				92	
2 18 04 2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha yang patuh terhadap kewajiban Perizinan Berusaha</b>	Kota Samarinda	2650 Pelaku Usaha				2700 Pelaku Usaha	
2 18 04 2.01 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Samarinda	5300 pelaku Usaha	334.078.000	APBD Kota	-	5400 Pelaku Usaha	344.100.000
2 18 04 2.01 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Samarinda	40 Pelaku Usaha	286.443.000	APBD Kota	-	40 Pelaku Usaha	290.000.000
2 18 04 2.01 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kota Samarinda	240 Kegiatan Usaha	265.225.000	APBD Kota	-	260 Kegiatan Usaha	270.000.000



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lembar 4 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 18 05	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Yang Melapor LKPM</b>	Kota Samarinda	300 Pelaku Usaha				300 Pelaku Usaha	
2 18 05 2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan Pengendalian	Kota Samarinda	300 Laporan				300 Laporan	
2 18 05 2.01 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Samarinda	50 kegiatan Usaha	164.439.000	APBD Kota	-	50 Kegiatan Usaha	169.372.000
2 18 05 2.01 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kota Samarinda	70 Pelaku Usaha	304.490.000	APBD Kota & DAK Non Fisik	-	100 Pelaku Usaha	109.272.000
2 18 05 2.01 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kota Samarinda	200 Kegiatan Usaha	231.090.000	APBD Kota & DAK Non Fisik	-	200 Kegiatan Usaha	109.272.000
2 18 06	<b>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Jumlah Pengguna Layanan Data</b>	Kota Samarinda	4200 Pengguna				4300 Pengguna	
2 18 06 2.01	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah sistem Aplikasi	Kota Samarinda	1 Sistem Aplikasi				1 Sistem Aplikasi	
2 18 06 2.01 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Samarinda	5000 DOKumen	408.446.000,00	APBD Kota	-	5000 DOKumen	420.699.000



---

#### **BAB IV**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Renja DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai upaya yang terencana untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang secara operasional diterjemahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2024.

Dengan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang telah secara rinci menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Renja DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2024 dituangkan dalam 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 35 (Tiga Puluh Lima) Sub Kegiatan, yaitu:





*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11			
		<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA</b>			<b>24.501.998.145</b>							
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>24.501.998.145</b>							
2	18	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>			<b>24.501.998.145</b>							
183	2	18	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Nilai IKM	88 Nilai	20.405.892.145					
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80.5 Nilai	200.000.000	-	-			
2	18	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	100.000.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>15.034.932.212</b>			-	-	
2	18	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	13.672.632.737	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	1.312.299.475	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18	01	2.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	50.000.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>10 Laporan</b>	<b>949.021.000</b>			-	-	
2	18	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	71.686.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	100.000.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	60.000.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	26.763.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	430.000.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	39.600.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18	01	2.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	22.000.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	198.972.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Rencana Kebutuhan Barang</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>208.000.000</b>			-	-	
2	18	01	2.07	0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	90.000.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	118.000.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan Penyediaan Jasa</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>2.794.651.333</b>			-	-	



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
2	18 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1.109.571.333	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	80.000.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.605.080.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
<b>2</b>	<b>18 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan Pemeliharaan</b>	<b>8 Laporan</b>	<b>1.219.287.600</b>			-	-	
2	18 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	258.480.300	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	156.707.300	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	217.390.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	586.710.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
<b>184</b>	<b>2 18 02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Regulasi Yang Mendukung Investasi</b>	<b>1 Regulasi</b>	<b>1.154.258.000</b>					
2	18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda	1 Dokumen	300.234.000			-	-	
2	18 02 2.01 0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	20 Dokumen	300.234.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
<b>2</b>	<b>18 02 2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>854.024.000</b>			-	-	
2	18 02 2.02 0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	259.920.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18 02 2.02 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	594.104.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
<b>185</b>	<b>2 18 03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Investor</b>	<b>225 Investor</b>	<b>947.637.000</b>					
2	18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi yang diselenggarakan	3 event	947.637.000			-	-	
2	18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	730.980.000	Kota Samarinda, dan Luar Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
2	18 03 2.01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	216.657.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA
<b>186</b>	<b>2 18 04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>91.5 %</b>	<b>885.746.000</b>					
2	18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang patuh terhadap kewajiban Perizinan Berusaha	2650 Pelaku Usaha	885.746.000			-	5. Program Smart City Plus	





*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11				
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5300 Pelaku Usaha	334.078.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus	DPMPTSP KOTA SAMARINDA	
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	286.443.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus	DPMPTSP KOTA SAMARINDA	
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	240 Kegiatan Usaha	265.225.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus	DPMPTSP KOTA SAMARINDA	
187	2	18	05		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Yang Melapor LKPM</b>	<b>300 Pelaku Usaha</b>	<b>700.019.000</b>						
2	18	05	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian</b>	<b>300 Laporan</b>	<b>700.019.000</b>			-	-		
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	50 Kegiatan Usaha.	164.439.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA	
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	70 Pelaku Usaha	304.490.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), D-	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha	231.090.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-	DPMPTSP KOTA SAMARINDA	
188	2	18	06		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Pengguna Layanan Data</b>	<b>4200 Orang</b>	<b>408.446.000</b>						
2	18	06	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sistem Aplikasi</b>	<b>1 Aplikasi</b>	<b>408.446.000</b>			-	5. Program Smart City Plus		
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5000 Dokumen	408.446.000	Kota Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Program Smart City Plus	DPMPTSP KOTA SAMARINDA	



---

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mendeskripsikan berbagai kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran sebagai wujud nyata dari pelaksanaan program-program yang sesuai dengan Visi, Misi dan program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026. Pelaksanaan program kerja mengacu pada tuntutan paradigma baru yang harus mengedepankan terwujudnya kesejahteraan dan keberpihakan kepada masyarakat luas.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Diharapkan Renja juga menjadi dasar yang kompeten dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pemutus kebijakan dalam rangka mewujudkan pencapaian target kinerja yang optimal.



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda*

---

# **LAMPIRAN**

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Tahun 2024**  
**Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Samarinda**

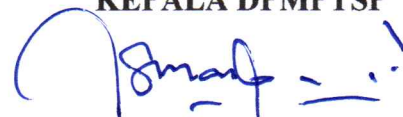
No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Pembentukan tim penyusun Renja PD dan Penyusunan Agenda Kerja.	√				Keputusan Walikota Samarinda Nomor 050-05/024/HK-KS/I/2023
2.	Pengolahan data dan informasi.	√				
3.	Analisis gambaran pelayanan PD	√				
4.	Mengkaji hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD	√				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	√				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD	√				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√				
10.	Pelaksanaan forum PD	√				Senin-Rabu, 06-08 Maret 2023
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan PD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan PD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi PD	√				



No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar PD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD sesuai surat edaran Walikota.	√				
11.	Sasaran program dan kegiatan PD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√				
12.	Program dan kegiatan antar PD dengan PD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum PD kabupaten/kota.	√				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√				
14.	Dokumen Renja PD yang telah disahkan.	√				

Samarinda, tanggal 20 Juli 2023

**KEPALA DPMPTSP**



**JUSMARANDHANA ALUS, SH, M.Si**  
NIP. 19711030 199403 1 002